

**MENGULIK SISI KETERLAMBATAN
PENYERAPAN ANGGARAN
(Studi Etnometodologi pada UKM Pusat Universitas Jember)**

***REVIEWING THE DELAY SIDE OF THE BUDGET APPLICATION
(Ethnomethodology Study at UKM Center, University of Jember)***

Ika Anisa Putri
ikaanisa52@gmail.com
Universitas Jember

Andriana
andriana.feb@unej.ac.id
Universitas Jember

Kartika
kartika.feb@unej.ac.id
Universitas Jember

Indah Purnamawati
indah.p@unej.ac.id
Universitas Jember

Alfi Arif
alfi.rif@unej.ac.id
Universitas Jember

ABSTRACT

This research aims to examine and investigate in depth about the causes of the absorption of delays that occur in the Central University of Jember University. This research begins with the uneasiness of the phenomenon that occurs in the Central UKM University of Jember will be a delay in the absorption of the budget. This problem certainly has an impact on funds used temporarily to meet pre-event needs. Even more so if the funds needed are large. In addition, this delay in budget absorption also results in suboptimal activities carried out and has an impact on the University of Jember, specifically related to one of the principles of GUG (Good University Governance), namely the principle of responsibility which indicates the extent to which the process of providing public services carried out by Jember University, is it already in accordance with administrative and organizational requirements that are true and in accordance with statutory regulations. This research is qualitative research using ethnomethodology study methods. The results showed that the cause of the delay in budget absorption was due to the delay in the submission of TOR, unpreparedness in the implementation of SIMAWA, the existence of a long bureaucratic process plus a clash of busyness from the approval party, delay in SPJ collection, accumulation of activity programs at the end of the year, and the number of activity programs proposed by Central UKM of Jember University.

Keywords: Public Sector Accounting, Budget Absorption, Good University Governance (GUG)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menelisik secara mendalam tentang penyebab keterlambatan penyerapan yang terjadi pada UKM Pusat Universitas Jember. Penelitian ini berawal dari adanya keresahan fenomena yang terjadi pada UKM Pusat Universitas Jember akan keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Adanya permasalahan ini tentu saja berdampak pada dana-dana yang digunakan sementara untuk memenuhi kebutuhan pra acara. Terlebih lagi jika dana yang dibutuhkan dalam nominal yang besar. Selain itu keterlambatan penyerapan anggaran ini juga mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan yang dilaksanakan serta berdampak pada Universitas Jember, khususnya terkait dengan salah satu prinsip GUG (*Good University Governance*) yaitu prinsip responsibilitas yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh Universitas Jember, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi etnometodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan dalam pengajuan TOR, ketidaksiapan dalam penerapan SIMAWA, adanya proses birokrasi yang panjang ditambah benturan kesibukan dari pihak *approval*, keterlambatan pengumpulan SPJ, penumpukan program kegiatan di akhir tahun, dan banyaknya program kegiatan yang diusulkan oleh UKM Pusat Universitas Jember.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Penyerapan Anggaran, *Good University Governance* (GUG)

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD tersebut, pada batang tubuh konstitusi Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Satuan pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi amanat Universitas Jember sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era global.

(UNEJ, 2019:12), Sebagai wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tersebut, maka Universitas Jember membentuk suatu organisasi yang disebut UKM. Pembelajaran yang didapatkan mahasiswa melalui adanya UKM ini tidak didapatkan di bangku perkuliahan sehari-hari. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intra kampus lainnya seperti senat mahasiswa dan badan

eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan merupakan sub-ordinat dari badan eksekutif maupun senat mahasiswa. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat (UKM) adalah ormawa tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas dari tiap mahasiswa.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkup Universitas Jember tiap periode atau tiap tahunnya diwajibkan untuk membuat anggaran sesuai dengan program kegiatan pada UKM masing-masing. Program kegiatan direncanakan dalam satu tahun anggaran pada awal tahun, sehingga diharapkan mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah diprogramkan. Program kegiatan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja organisasi tahun sebelumnya, dan disusun sebagai naskah Program Kerja Tahunan, yang memuat serangkaian kegiatan berbasis aktivitas yang masing-masing kegiatan diuraikan mengikuti Pedoman Penyusunan TOR kegiatan ormawa Universitas Jember.

UNEJ (2019), TOR (*Term of Reference*) merupakan dokumen sistem perencanaan dalam mengesekusi rencana strategis. Melihat posisi ini, maka capaian rencana startegis sangat ditentukan oleh TOR yang disusun dan diusulkan oleh tiap UKM. TOR inilah yang akhirnya menjadi dasar dalam merealisasikan anggaran. Penyusunan TOR yang baik akan memberikan arah dan jaminan mutu terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

TOR sebagai dokumen perencanaan justru menempati posisi yang paling strategis, karena berdasarkan TOR inilah kegiatan dilaksanakan, dan berdasarkan TOR ini juga anggaran atau biaya bisa dicairkan (UNEJ, 2019). Dengan demikian TOR yang baik akan membantu pelaksana TOR untuk melaksanakan kegiatan secara terarah dan mengurangi resiko kegagalan ketercapaian tujuan sekaligus memberikan jaminan ketercapaian Renstra.

Namun, meskipun tiap UKM sudah mengajukan anggaran di awal tahun, tetapi pada realisasinya terjadi masalah pada penyerapan anggaran. Salah satunya yaitu permasalahan tentang keterlambatan penyerapan anggaran. Keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM Pusat ini dipengaruhi oleh realisasi anggaran atau dana yang dicairkan tersebut. Setiap kali melakukan kegiatan, seharusnya dana dicairkan sebelum acara atau tepat waktu walaupun tidak 100%. Hal ini bertujuan agar setiap kali melakukan kegiatan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dipersiapkan.

Namun dalam pelaksanaan penyerapan anggaran yang terjadi pada UKM pusat masih belum memenuhi harapan. Salah satu indikasinya yaitu adanya keterlambatan penyerapan anggaran. Sehingga, adanya keterlambatan serapan anggaran akhir-akhir ini seringkali diresahkan oleh beberapa UKM-UKM yang akan melakukan program kegiatan. Hal ini tentu saja berdampak pada dana-dana yang digunakan sementara untuk memenuhi kebutuhan pra acara. Terlebih lagi jika dana yang dibutuhkan dalam nominal yang besar. Selain itu adanya keterlambatan penyerapan anggaran ini juga mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan yang dilaksanakan.

Penelitian mengenai mengulik sisi keterlambatan penyerapan anggaran dengan menggunakan studi etnometodologi pada ukm pusat Universitas Jember ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengkaji bahwa penyerapan anggaran yang maksimal sangat penting dilakukan dalam upaya penggunaan anggaran pada output yang jelas, terukur, dan bermanfaat besar bagi tiap UKM maupun Universitas Jember.

Sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Herriyanto (2012) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan

kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Penelitian Herriyanto menyatakan bahwa menghasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan ganti uang persediaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Miliasih (2012) mengenai analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara atau lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru menghasilkan dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Selain itu ada juga beberapa penelitian yang mendukung, salah satunya penelitian dari Ridani (2015) yang menganalisis Analisis penyerapan anggaran belanja daerah di kabupaten Ulungan. Hasil penelitiannya menghasilkan faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor penganggaran; komitmen organisasi; pengendalian dan pengawasan internal; kompetensi SDM pengadaan; kompetensi SDM pengelola keuangan, dan regulasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih condong di lingkup pemerintahan, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada penyerapan anggaran di lingkup universitas. Alasan peneliti ingin meneliti judul tentang analisis keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM pusat Universitas Jember yaitu karena fenomena yang beberapa pekan ini sering terjadi khususnya pada beberapa UKM Universitas Jember yang terjadi permasalahan tentang keterlambatan penyerapan anggaran atau terlambat dalam proses pencairan dana. Permasalahan ini tentu akan berdampak bagi UKM tersebut maupun bagi Universitas Jember. Oleh karena itu, fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk memahami lebih mendalam tentang penyebab dan solusi keterlambatan penyerapan anggaran terjadi di lingkup UKM Universitas Jember. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam tentang penyebab keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM Pusat Universitas Jember dan memberikan solusi untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran pada UKM Pusat Universitas Jember.

2. TINJAUAN LITERATUR

Penetapan tujuan atau sasaran yang dilakukan oleh manajemen penting untuk dilaksanakan untuk mencapai kinerja. Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan tujuan dengan kinerja, semakin tinggi komitmen untuk mengabdikan pada organisasi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, maka semakin tinggi pula usaha atau kinerja seseorang sehingga dapat mempengaruhi kinerja.

Menurut Price Waterhouse Coopers dalam (Yuwono, 2011) yang menyatakan bahwa Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. Sedangkan *Good University Governance* (GUG) menurut Wijatno (2009:126), dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “*Good Governance*” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good University Governance* (GUG) merupakan bagian dari *Good Governance* yang penyelenggaraannya di dunia pendidikan yaitu perguruan tinggi. *Good University Governance* (GUG) merupakan suatu

konsep yang menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas. Menurut Wijatno (2009), pencapaian GUG dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Berikut penjelasan masing-masing indikator.

Transparansi

Mengukur transparansi pada pengelolaan perguruan tinggi harus dan dapat menerapkan prinsip keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, sistem dan prosedur akuntansi, pelaporan keuangan, rekrutmen dosen dan karyawan, pemilihan pejabat struktural, pemilihan pengurus dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu (Wijatno, 2009)

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) menurut Wijatno (2009) Universitas harus mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) dari setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas atau akademis, pengurus yayasan, dosen dan karyawan termasuk juga kriteria dan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya antara lain: melakukan penilaian analisis dan interpretasi dari aktivitas suatu organisasi secara independen. Ruang lingkup audit internal mencakup aspek kegiatan dalam organisasi dalam rangka penilaian kinerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Selain itu ada baiknya juga dilakukan manajemen audit atau finansial audit plus oleh pihak eksternal yang independen.

Anggaran

Pengertian anggaran menurut Munandar (2007:11), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Menurut Mulyadi (2001), “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan tujuan dan manfaat anggaran satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (*programming*)”.

Penyerapan Anggaran

Sejak tahun 2005, sesuai amanat UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Sebagai langkah dalam mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17 tahun 2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan

pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya-tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu satker menjadi tolak ukur kinerja dari satker tersebut.

Menurut Noviwijaya dan Rohman (2013), penyerapan anggaran satuan kerja adalah “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100% dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana dan/atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (*Ministry of Finance, Planning and Economic Development of Uganda, 2011*”. Hingga saat ini pemerintah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategori mengalami keminiman penyerapan anggaran. Namun beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh kepala satker, bahwa suatu pemerintah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total anggaran yang telah disusun (Arif dan Halim, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan studi etnometodologi. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang bersal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dokumen-dokumen, baik dokumen yang diperoleh secara langsung dari beberapa dokumen anggaran dan realisasi anggaran tiap UKM di Univeristas Jember ataupun didapatkan dari dokumen-dokumen terkait dengan penyerapan anggaran kegiatan kemahasiswaan di Universitas Jember. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur, Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dimuai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Langkah selanjutnya dari data yang didapat melalui observasi, wawancara dengan bendahara tiap UKM dan bagian kemahasiswaan serta melihat dokumen pengajuan anggaran atau TOR, yaitu melakukan analisis, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa UKM Pusat Universitas Jember sering mengalami kendala atau permasalahan tentang penyerapan anggaran. Permasalahan ini yaitu tentang adanya keterlambatan penyerapan anggaran. Seharusnya pada sebelum kegiatan saat melakukan program kegiatan baik untuk mengikuti lomba, perwakilan delegasi, maupun

mengadakan suatu acara atau kegiatan setidaknya sudah ada beberapa persen dana yang dapat digunakan oleh UKM tersebut untuk menutupi kebutuhan pra acara. Namun realisasinya anggaran tersebut baru terserap setelah kegiatan berlangsung. Hal ini tentu mempengaruhi UKM Pusat dalam melakukan suatu program kegiatan. Opy Nur Dianti selaku Ketua Divisi Keuangan dan Administrasi menyatakan sebagai berikut.

“...sering telat penyerapan anggarannya. Kebetulan juga tahun ini ada sistem baru sehingga dananya itu agak susah”

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Rizky Sesaria selaku bendahara UKM Kesenian yang menyatakan bahwa.

“Selalu mbak. Tapi pernah dulu ada program kerja yang mengajukan dana juga ke pihak rektorat yaitu di awal bulan saat mengikuti lomba tari NFF di Jakarta. Dana tersebut cair pada saat teman-teman sudah berangkat ke Jakarta”

(Miliasih, 2012) mengungkapkan bahwa dana dalam pencairan anggran tidak seluruhnya bisa cair 100% pada pencairan pertama. Namun biasanya pelaksana kegiatan harus menyiapkan dana cadangan. Setelah melakukan LPJ, maka dana itu bisa dicairkan. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi pada UKM Pusat Universitas Jember. Adanya keterlambatan ini membuat pengurus atau panitia UKM Pusat Universitas Jember memikirkan terkait dengan dana cadangan yang harus disiapkan. Persiapan dana dalam nominal kecil mungkin saja bisa diantisipasi melalui dana iuran, dana kas, atau bahkan sponsorship. Namun jika anggaran yang dibutuhkan dalam nominal yang besar, maka pengurus atau panitia UKM Pusat Universitas Jember harus mencari cara lain, salah satunya yaitu menggunakan dana pribadi sambil menunggu dana tersebut bisa dicairkan. Berikut kutipan wawancara dengan Khofifatuz Zahro selaku Bendahara UKM Basket.

“Pusing mbak. Karena kita harus nalangi dulu uangnya. Entah itu dari uang kas, iuran, uang pendaftaran, bahkan pernah saat acara kemarin menggunakan uang beasiswa Ketua Umum kami untuk menutup terlebih dahulu. Intinya kita harus berani mengambil risiko sebagai pengurus UKM agar program kegiatan kita tetap terealisasi”

Opy Nurdianti selaku Ketua Divisi Keuangan dan Administrasi UKM Staflix juga mengungkapkan hal yang serupa, yaitu sebagai berikut.

“Ya menggunakan uang kas dulu. Kadang ya kita nyari partnership. Kita nyari profit, project, kita jualan juga. Kalau untuk project tadi itu menggunakan uangnya kita. Bahkan di Ketua Panitianya aja ada uangnya Rp2.000.000. Akhirnya karena satu kegiatan ini belum selesai jadi menghambat SPJan dan akhirnya semua kegiatan belum terserap semua anggarannya untuk kegiatan dekat-dekat ini”

Fenomena keterlambatan penyerapan anggaran memang sering terjadi pada beberapa UKM Pusat Universitas Jember. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapaun beberapa penyebab keterlambatan penyerapan pada UKM Pusat Universitas Jember serta solusinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Penyebab dan Solusi Keterlambatan Penyerapan Anggaran

No	Penyebab	Solusi
1	Keterlambatan TOR	a) UKM Pusat Universitas Jember harus melakukan perencanaan TOR yang matang dan tidak terburu-buru. b) UKM Pusat Universitas Jember harus tepat waktu dalam pengajuan anggaran
2	Penggunaan system baru (SIMAWA) yang belum efektif	a) Universitas Jember melakukan serap aspirasi kepada mahasiswa dan seluruh pengguna mengenai program SIMAWA. Khususnya terkait dalam penyerapan anggaran, Universitas Jember harus melakukan perbaikan pada SIMAWA. b) Mengadakan program sosialisasi tentang penyerapan anggaran dan penggunaan SIMAWA pada awal periode
3	Proses birokrasi yang cukup panjang dan terjadi keterlambatan approve oleh atasan	a) UKM Pusat Universitas Jember harus melakukan pengajuan minimal 2 minggu atau 14 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. b) Ketepatan waktu bagi pihak approval seperti dari pembina UKM, kabag kemahasiswaan, biro 2, warek 1, dan lain-lain
4	Keterlambatan pengumpulan SPJ.	Displin waktu dalam mengumpulkan laporan SPJ. laporan SPJ harus dikumpulkan seminggu setelah kegiatan selesai.
5	Penumpukan program kegiatan di akhir tahun	Mengadakan program sosialisasi tentang penyerapan anggaran yang baik agar UKM Pusat Universitas Jember mengetahui bagaimana penyerapan anggaran yang baik dan memahami program-program yang akan diusulkan serta tidak cenderung menjadwalkan pada akhir periode atau akhir tahun.
6	Banyaknya program kegiatan yang diusulkan	Meminimalisir jumlah program kegiatan yang akan dilaksanakan. Tiap UKM Pusat Universitas Jember harus menyesuaikan program yang akan diusulkan selama satu periode

Sumber: Sumber data diolah

5. KESIMPULAN

Keterlambatan serapan anggaran pada UKM Pusat Universitas Jember disebabkan karena Keterlambatan pengajuan TOR. Keterlambatan ini terjadi karena kurangnya persiapan UKM tersebut dalam penyusunan deskripsi kegiatan dan rincian RAB maupun perubahan konsep kegiatan: Penggunaan sistem baru (SIMAWA) yang belum siap dan maksimal; Proses birokrasi yang panjang ditambah benturan kesibukan dari atasan membuat proses penyerapan anggaran menjadi terhambat khususnya dalam proses approval; Keterlambatan pengumpulan SPJ, SPJ seharusnya dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah kegiatan berlangsung. Namun pada kenyataannya banyak UKM Pusat Universitas Jember yang tidak disiplin dalam pengumpulan SPJ; Penumpukan program kegiatan di akhir tahun, Banyaknya program kegiatan yang diusulkan oleh UKM Pusat ini menyebabkan menumpuknya TOR yang harus diurus oleh pihak Universitas Jember sehingga menimbulkan kendala selama proses penyerapan anggaran; Banyaknya program kegiatan yang diusulkan. Terlebih saat ini Universitas Jember hanya membatasi 8 program kegiatan yang bisa diusulkan. Namun pada realitinya masih terdapat beberapa UKM yang mengajukan program kegiatan khususnya dalam penyerapan anggaran lebih dari 8 program.

REFERENSI

- Arif, E. 2013. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
- Herriyanto, H. 2012. Analisis atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: FE UI.
- Miliasih, 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran di Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Provinsi Pekanbaru
- Mulyadi. 2001. Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar, M. 2007. Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi Kedua.. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Noviwijaya, Amdi & Rohman, Abdul. Pengaruh Keragaman Gender dan UsiaPejabat Perbendaharaanterhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja(Studi Empiris pada Satuan KerjaLingkup Pembayaran KPPN Semarang. Diponegoro. Journal of accounting Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013: 1-10, 2013
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003
- Wijatno, S. 2009. Pengantar Entrepreneurship, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuwono, I. 2011. Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.